

BAB V

KESIMPULAN

Safaruddin Datuk Bandaro Rajo adalah seorang tokoh lokal dari Desa Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Safaruddin Datuk Bandaro Rajo mengawali karirnya dengan menjadi wali nagari di Baruah Gunuang pada tahun 1982 selama satu tahun, dan tahun 1983 kembali dilakukan pemilihan pemimpin desa karena terjadinya perpindahan dari nagari ke desa. Tahun 1983-1993 Safaruddin Datuk Bandaro Rajo kembali terpilih menjadi Kepala Desa Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan.

Setelah 10 tahun menjabat menjadi Kepala Desa Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo diusulkan oleh Sukarni dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melanjutkan karir sebagai anggota dewan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 1992 sampai 1997 Safaruddin Datuk Bandaro Rajo masuk ke legislatif menjadi anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, periode 1997-1999 kembali menjadi anggota DPRD, Namun tidak habis satu periode karena terjadinya Reformasi. Tahun 1999 Safaruddin Datuk Bandaro Rajo kembali mengikuti pemilu karena lengsernya Presiden Soeharto dari Jabatannya, yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Sejak tahun 1999 hingga tahun 2004, Safaruddin Datuk Bandaro Rajo terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD Lima Puluh Kota dari partai Golkar

(Golongan Karya). Namun pada tahun 2004 hingga tahun 2009 Safaruddin Datuk Bandaro Rajo vakum dari dunia politik dan sibuk menjalankan usaha pakaian di Bukittinggi. Dari sela waktu berdagang pakaian Safaruddin Datuk Bandaro Rajo mempersiapkan diri untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2009. Tahun 2009 usaha Safaruddin Datuk Bandaro Rajo membawa hasil Ia kembali terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2009-2014. Pada Pemilu 2014 Safaruddin Datuk Bandaro Rajo kembali terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2014-2019.

Selama masa pengabdianya di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Safaruddin Datuk Bandaro Rajo telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam rangka menampung banyak aspirasi masyarakat. Datuk Safaruddin juga menyebut, sejak pelaksanaan otonomi daerah, banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dengan berorientasi pada tata pemerintahan yang baik (*good government*) maka semua berusaha berbuat secara profesional dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Demikian pula dalam hal politik, ekonomi, dan hukum juga merupakan sektor yang paling banyak mengalami perubahan karena berbagai tuntutan oleh masyarakat.